

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Semakin berkembangnya dunia pariwisata, khususnya di tanah air merupakan dampak logis dari usaha yang dilakukan pemerintah guna mencari alternatif sumber pendapatan negara. Pemanfaatan pariwisata sebagai sumber devisa merupakan pilihan yang tepat dengan melihat perkembangannya secara global baik pariwisata itu sendiri maupun faktor pendukung lainnya seperti kemajuan di bidang ekonomi dunia.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu pertimbangan yang logis dan realistis, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Sehingga tidak dapat dikesampingkan lagi bahwa sektor pariwisata dapat dikembangkan untuk menunjang pendapatan devisa negara di masa yang akan datang. Pariwisata diharapkan tidak hanya penting bagi devisa negara saja tetapi juga sebagai faktor dalam menentukan lokasi industri dan dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin sumber alam. Salah satu pengaruh perkembangan pariwisata sebagai suatu industri dunia ke tiga menimbulkan kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, jasa angkutan, akomodasi, dan lain-lain.

Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Boalemo dengan ibu kota

Gorontalo pada tahun 1999¹. Kabupaten Boalemo yang pada saat itu baru saja memekarkan dirinya, memiliki dua sektor unggulan yang diandalkan Pemkab Boalemo dalam memenuhi pendapatan daerahnya.

Yang pertama adalah melalui hasil bumi yakni pertanian yaitu jagung dan perikanan. Setelah Bupati Iwan Bokings menjelaskan salah satu program pengembangan potensi perikanan kepada Pengusaha dari Thailand, pengusaha dari negeri gajah putih itu ternyata tertarik dan bersedia untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Boalemo dengan cara membangun pabrik kapal dan pabrik es untuk menunjang sarana dan prasarana dalam pengembangan potensi perikanan di Boalemo.²

Yang kedua adalah melalui sektor pariwisata. Kabupaten ini memiliki beragam wisata alam. Itu tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah yang berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah utara dan Teluk Tomini di sebelah selatan. Diantaranya adalah: **Pantai Boalemo Indah di Desa Bolihutuo** dan **Air Terjun Ayuhulalo di Desa Ayuhulalo**.

Berbeda dengan migas dan hasil bumi yang kapan saja dapat habis, kegiatan pariwisata akan semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebudayaan di negara tersebut, sehingga akan semakin banyak dilakukan kegiatan pariwisata dan semakin banyak keinginan orang untuk melakukan perjalanan karena satu faktor dari dalam diri manusia yang selalu ingin mengetahui kebudayaan orang lain dan keadaan di luar lingkungannya.

¹ www.google.com search; *Kabupaten Boalemo*, 8 Februari 2003, hlm. 1

Fenomena yang begitu menarik ini menjadi point penting bagi Boalemo untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pariwisata. Dalam hal ini, penulis mengangkat studi kasus: **Wisata Pantai Bolihutuo, Kabupaten Boalemo**. Kawasan wisata pantai yang nyaman dan menawarkan berbagai keindahan alam yang layak untuk konsumsi Internasional telah mereka miliki. Namun berbagai hambatan masih mewarnai ‘perjalanan’ daerah wisata pantai Kabupaten Boalemo menuju taraf Internasional.

Melihat kenyataan tersebut, penulis merasa tertarik sehingga penulis memberanikan diri untuk mengambil penelitian dengan judul:

***Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Dalam Mengembangkan
Pariwisata Boalemo Sebagai Obyek Wisata Internasional
(Studi Kasus: Wisata Pantai Bolihutuo, Kabupaten Boalemo)***

Penulis mengangkat studi kasus Wisata Pantai Bolihutuo karena kawasan wisata pantai Bolihutuo saat ini sedang menjadi tujuan utama wisatawan yang datang berwisata di Kabupaten Boalemo. Selain menawarkan keindahan alam bak mutiara kepariwisataan yang terhampar di pesisir Teluk Tomini, minat masyarakat akan hadirnya wisata pantai Boluhutuo ini juga sangat antusias. Terlihat dari jumlah pengunjung yang tidak sedikit setiap tahunnya³ dibandingkan dengan tujuan wisata lainnya yang terdapat di Boalemo yang masih tergolong dalam lokasi yang terisolir karena sulitnya pencapaian menuju

lokasinya serta kurangnya pengenalan masyarakat terhadap lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, lokasi wisata selain pantai Bolihutuo masih terbilang “*virgin*” atau belum tersentuh sama sekali. Belum adanya tarif retribusi yang dikenakan pemerintah daerah untuk mengunjunginya serta kurangnya data-data pengunjung dan data-data mengenai lokasi-lokasi wisata tersebut membuat penulis akhirnya memutuskan untuk memilih wisata pantai Bolihutuo yang jelas-jelas telah mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.

Kenyataan tersebut menaruh harapan besar terhadap Pemerintah Daerah Boalemo yang sangat berharap datangnya investor-investor baik lokal maupun asing yang mau menanamkan modalnya di Boalemo demi tercapainya sebuah Wisata Pantai Bolihutuo yang bertaraf Internasional sehingga Pantai Bolihutuo yang indah tidak hanya dikenal di Provinsi Gorontalo dan Indonesia saja tetapi juga di dunia.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membantu penulis memahami, mengetahui, dan mendalami lebih lanjut mengenai dunia pariwisata Indonesia. Selanjutnya lebih terfokuskan pada Daerah Kabupaten Boalemo untuk mendeskripsikan potensi dan peluang Boalemo untuk menjadi sebuah daerah kunjungan wisata yang bertaraf Internasional terutama bagi kawasan pantai Bolihutuo yang menjadi studi kasus yang penulis angkat.

Berikut ini penulis menyebutkan beberapa tujuan dari penulisan skripsi ini yakni:

1. Untuk meneliti apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo dalam hal ini BAPPEDA dan Badan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dalam mengembangkan potensi wisata pantai Bolihutuo menjadi wisata pantai Internasional.
2. Dapat diketahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat di dalam pengembangan wisata pantai Internasional di Boalemo.
3. Diharapkan dengan adanya pengembangan di bidang pariwisata ini dapat meningkatkan hubungan dengan negara lain, tidak hanya di bidang pertanian dan perikanan saja, tetapi juga di bidang pariwisata dan tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang lainnya.
4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Diplomasi merupakan cara, dengan peraturan dan tata krama tertentu, yang digunakan suatu negara guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain atau dengan masyarakat

bisa dipisahkan bertalian sangat erat dengan politik luar negeri dan juga dengan politik internasional.⁴

Secara konvensional, dalam bentuknya yang paling tajam, diplomasi berupa perundingan yang dilakukan oleh para pejabat resmi negara sebagai pihak-pihak yang mewakili kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam perkembangannya kemudian, pelaku-pelaku diplomasi bukan hanya pejabat negara, melainkan juga kalangan swasta atau individu-individu yang mewakili kepentingan nasional negaranya dengan sepengetahuan atau persetujuan pemerintah.

Bentuk diplomasi yang kini menjadi sebuah sarana berhubungan dengan negara lain adalah diplomasi kebudayaan yang tidak hanya menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer saja, melainkan juga dengan menonjolkan bidang kebudayaan.

Melalui diplomasi kebudayaan, para aktor diplomasi tidak hanya melakukan kegiatan diplomasi yang mengandalkan bidang politik, ekonomi dan militer, tetapi juga para aktor diplomasi dapat memenuhi kepentingan nasionalnya melalui kebudayaan. Dengan demikian, diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan.⁵

Dalam hal ini, kepentingan nasional yang menjadi alasan bagi para aktor diplomasi terdiri dari berbagai kepentingan yang salah satunya adalah kepentingan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain

⁴ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan; Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang*, Ombak, Yogyakarta, 2007, hlm. x-xi

⁵ *Ibid*, hlm. 4

dalam bentuk eksibisi atau pameran yang menampilkan karya seni atau keindahan alam yang dimiliki suatu bangsa melalui sarana yang disebut dengan Pariwisata.

Melalui pariwisata, aktor diplomasi bisa mendapatkan pengakuan dari negara lain sehingga dengan pengakuan internasional tersebut mampu untuk meyakinkan investor atau penanam modal untuk datang ke negaranya untuk 'membantunya' mengembangkan potensi pariwisata yang dimilikinya sehingga selain terjalinnya kerja sama antar sebuah negara dengan negara lain melalui penanaman modal tersebut, juga terjadi peningkatan sejumlah keuntungan bagi kedua belah pihak seperti meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan terutama kunjungan wisatawan mancanegara yang tentunya meningkatkan devisa negara baik yang menjadi tuan rumah melalui tarif retribusi yang dikenakan kepada wisatawan, juga bagi negara yang menanamkan modalnya dengan mendapatkan keuntungan yang besar sebagai akibat dari banyaknya pengunjung yang datang dan memanfaatkan fasilitas yang dibangun dengan modal para investor tersebut.

Berikutnya, akan terjalin berbagai hubungan luar negeri dalam bidang-bidang lainnya maka yang menjadi kepentingan nasional pun dapat terwujud.

Di Indonesia, Beberapa kebijaksanaan Pemerintah pusat dalam sektor pariwisata diantaranya sebagai berikut. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan seperti mengencarkan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk wisata, mengembangkan

dan produk-produk baru terutama di wilayah Timur

Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dan melaksanakan Kampanye Nasional yang berkesinambungan.⁶

Pengembangan pariwisata Indonesia dapat dilihat dari pentahapan kegiatan pariwisata yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu: Pada tahun 1989, Kampanye Nasional Sadar Wisata (KNSW) yang tema sentralnya Sapta Pesona. Tahun 1990, Pameran Akbar Wisata Indonesia (*Indo Tourism 1990*). Tahun 1991, *Visit Indonesia Year 1991*. Tahun 1992, *Visit Indonesia year 1992, ASEAN Festival Performing Art (Prambanan Festival)*. Tahun 1998 sebagai tahun Seni dan Budaya dan pada tahun 1999 ditindak lanjuti dengan program *Indonesia Welcome You*.⁷ Dan yang terbaru menuju tahun 2008 adalah *Visit Indonesia year 2008*.

Dewasa ini, pelaku hubungan Internasional kini tak lagi terbatas pada sebuah Negara saja. Meningkatnya intensitas interaksi antar Negara dan antar bangsa di dunia telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara serta pada gilirannya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-

Undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai **dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri** untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini. Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri tidak hanya merupakan monopoli negara (*state actors*). Sebagai contoh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) memberikan kemungkinan Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing. Makin beragamnya aktor hubungan luar negeri selain negara (*non-state actors*) seperti organisasi-organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok minoritas, individu dan bahkan Pemerintah daerah harus dianggap sebagai suatu potensi bagi perjuangan diplomasi Indonesia dilingkup Hubungan internasional. Ragam aktor tersebut dapat digunakan Indonesia sebagai model diplomasi multi-jalur (*multitrack diplomacy*) untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Dengan kata lain, **hubungan dan kerjasama luar negeri dapat juga dijalankan oleh para pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, para pejabat daerah, mahasiswa, wisatawan dan sebagainya**. Tentunya hubungan dan kerjasama luar negeri dimaksud harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri.⁸

⁸http://www.deplu.go.id/download/uu_peraturan/Hyperlink%20Files/Sambutan%20Menteri%20Luar%20Negeri.pdf, Hassan Wirajuda, Desember 2006

Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta, merupakan kabupaten baru, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 1999⁹. Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang *Pembentukan Kabupaten Boalemo*.

Sebagai Kabupaten yang baru, Boalemo pun tentu memiliki kepentingan nasional yaitu kepentingan yang mengaitkan negara lain dalam hal ini adalah jalinan kerjasama luar negeri. Kepentingan tersebut adalah meningkatkan pendapatan daerahnya melalui kerja sama luar negeri yang terjadi di sektor-sektor yang menjadi unggulannya yaitu pertanian, perikanan dan pariwisata.

Dari sektor pertanian dan perikanan, Pemkab Boalemo telah berhasil meyakinkan Thailand untuk mau bekerja sama dalam hal ini pengusaha Thailand atas nama perusahaan swasta di negaranya membangun pabrik kapal dan pabrik es di Kabupaten Boalemo untuk menunjang sarana prasarana proyek pengembangan etalase perikanan di Kabupaten Boalemo meskipun untuk sektor pertanian, Pemkab Boalemo masih mengandalkan dana dari pusat serta KKP (Kredit Ketahanan Pangan) sebesar 1,9 Milyar sebagai wujud komitmen Bank Mandiri Propinsi Gorontalo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kredit lunak kepada para petani di Kabupaten Boalemo.¹⁰

Dalam sektor pariwisata, untuk meningkatkan devisa daerah melalui pariwisata, Boalemo pun berupaya mengembangkan sektor pariwisatanya dalam hal ini, perhatian penuh dari Pemkab Boalemo untuk wisata pantai Bolihutuo

⁹ www.google.com Search; Kabupaten Boalemo, Rabu 2 Juli 2003, hlm. 1

¹⁰ <http://www.boalemo.iwebland.com/boalemoinfo>, *Himpunan Informasi Tentang Kabupaten Boalemo*, 3 Januari 2003, hlm. 6

menjadi obyek wisata internasional dengan harapan dapat menjalin kerja sama luar negeri dengan negara lain di bidang pariwisata seperti halnya yang terjadi pada bidang perikanan dan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari Belanda sebesar 2.25 Miliar.¹¹

Sebagai Kabupaten baru yang baru yang kaya akan keindahan alam dan budaya terutama keindahan pantai Bolihutuo yang memiliki jejeran pohon pinus di tepi pantainya, daerah ini terus menggali dan berusaha mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan pariwisata. Berbagai sarana dan prasarana dibenahi. Berbagai fasilitas pun coba mereka kembangkan dan lengkapi kekurangannya. Hal tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Boalemo dalam mengembangkan sektor pariwisatanya, dalam hal ini adalah wisata pantai Bolihutuo. Selain itu, promosi pun menjadi satu hal yang tidak kalah penting perannya yang menjadi salah satu upaya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam mengembangkan sebuah sektor pariwisata menjadi pariwisata yang bertaraf internasional.

Pariwisata yang bertaraf internasional memiliki lima unsur dasar utama yang harus dipenuhi yang selengkapnya penulis bahas pada point “Kerangka Dasar Teori” serta pada rencana daftar isi yang tercantum pada Bab II. Lima unsur dasar tersebut adalah hal-hal yang menarik wisatawan, fasilitas pendukung, infrastruktur, transportasi, dan keramahan masyarakat sebagai tuan rumah. Dan tentunya lima unsur dasar tersebut haruslah bertaraf internasional. Dalam artian, “pantas” untuk dikonsumsi wisatawan mancanegara.

Terlihat bahwa dalam mencapai kepentingan nasional melalui mengembangkan wisata pantai Bolihutuo sebagai wisata pantai yang bertaraf Internasional, Kabupaten Boalemo membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang saling mendukung. Selayaknya sebuah daerah kunjungan wisata Internasional haruslah memiliki apa yang disebut dengan persyaratan seperti yang disebutkan dalam Lima Unsur Dasar Obyek Wisata Internasional di atas. Maka Kabupaten Boalemo pun harus memenuhinya demi untuk pencapaian tujuan yang telah dipaparkan penulis yakni untuk menjadi sebuah kawasan wisata pantai Internasional pada khususnya.

Mengembangkan wisata pantai Bolihutuo menjadi obyek wisata Internasional tentu saja membawa dampak positif bagi Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Kabupaten Boalemo pada khususnya. Dengan kondisi kawasan wisata pantai Bolihutuo yang sudah ada sekarang, Pemerintah Kabupaten Boalemo tentunya berharap adanya investor-investor terutama investor asing yang datang untuk menanamkan modalnya di Boalemo khususnya untuk mencapai tujuan utama tadi.

Investor-investor yang tertarik dengan kondisi wisata pantai Bolihutuo pada khususnya, nantinya akan menanamkan investasinya dengan cara membangun hotel berbintang, Cottage mewah, membeli mobil-mobil wisata untuk menjangkau lokasi pantai, membangun restoran kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas, sarana olah raga, SPA kecantikan, dan semua itu berlokasi

menggaet banyak pengunjung lokal maupun Internasional karena nilai jual yang mereka tawarkan pastinya meningkat setaraf internasional.

Dan semua itu jelas memberi keuntungan tersendiri bagi Investor itu sendiri, bagi Pemerintah Pusat, bagi Pemerintah Daerah, bagi masyarakat lokal serta wisatawan.

1. Bagi Investor

Bagi investor, jelas mendapatkan banyak keuntungan dari kepemilikan hotel, restoran, cottage, dan berbagai fasilitas lainnya. Keuntungannya jelas berupa uang yang melimpah dengan banyaknya pengunjung yang nantinya akan tertarik dengan fasilitas yang mereka tawarkan.

2. Bagi Pemerintah Pusat Maupun Daerah

Jelas bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah mendapatkan tambahan devisa dari hasil penjualan tiket masuk kawasan obyek wisata pantai. Dan bagi Pemerintah Daerah pada khususnya, jelas akan memiliki kebanggaan tersendiri akan berkembangnya kawasan wisata pantai yang dimilikinya.

Dan dengan meningkatnya taraf kawasan wisata pantai Bolihutuo menjadi setaraf Internasional juga tentu akan mengundang minat Tamu Luar Negeri untuk tidak sumkan melaksanakan program-program kerjasamanya dengan Pemerintah Boalemo di salah satu gedung serba guna yang akan dibangun di kawasan pantai Bolihutuo.

3. Bagi Masyarakat Lokal

Bagi masyarakat lokal, dengan adanya aktifitas seperti yang telah penulis

dalam hal ini, sumber daya manusianya dapat diberdayakan melalui lakunya dagangan mereka, tingkat permintaan konsumen akan meningkatkan pula kekreatifan masyarakatnya dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam produk-produk yang mereka perdagangkan di lingkungan obyek wisata pantai dan sebagainya.

Tingkat kesibukan yang pasti meningkat di lingkungan obyek wisata pantai jika pengunjungnya meningkat jelas akan menambah sebuah lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokalnya dan hal tersebut akan sangat membantu keadaan perekonomian masyarakat lokalnya.

4. Bagi Wisatawan

Dengan terpenuhinya berbagai fasilitas yang mendukung di lokasi wisata pantai Bolihutuo jelas-jelas akan mendatangkan kepuasan tersendiri bagi wisatawan sehingga perjalanan wisata mereka pastinya tidak akan sia-sia dan tentunya akan membawa kesan yang menyenangkan serta kenyamanan yang luar biasa. Dan yang pasti, perasaan untuk bisa kembali lagi berwisata di Pantai Bolihutuo akan melekat erat di benak mereka.

D. Rumusan Masalah

Melihat situasi dan kondisi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten

Berdasarkan pemaparan seperti pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas secara panjang lebar, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Dalam Mengembangkan Pariwisata Pantai Bolihutuo, Kabupaten Boalemo Menjadi Obyek Wisata Internasional...?”

E. Kerangka Dasar Teori

Sebuah penulisan, agar membentuk suatu analisa dan hasil yang ilmiah sebagai hasil memahami suatu fenomena yang menjadi pusat perhatiannya, maka digunakan suatu “Alat Bantu” dalam kerangka dasar pemikirannya.

Dalam penulisan skripsi ini agar terbentuk suatu pemahaman bersama yang utuh dalam membahas masalah pariwisata, khususnya pariwisata yang layak untuk konsumsi internasional maka penulis menggunakan ‘batasan’ yang menjadi landasan berpikir.

Dalam hal ini penulis menggunakan dua konsep dan satu teori sebagai kerangka berpikir untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan Skripsi ini, yaitu:

Konsep Diplomasi Kebudayaan untuk menjelaskan tentang segala hal yang dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya (dalam politik luar negeri)

Teori Peranan untuk menjelaskan tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam hal ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Boalemo untuk mengembangkan wisata pantai Bolihutuo menjadi obyek wisata Internasional, dan **Konsep Wisata Internasional** untuk menjelaskan tentang lima unsur dasar yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah obyek wisata bertaraf Internasional.

1. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi adalah sebagai usaha suatu negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional.¹² Dalam hal ini, diplomasi diartikan tidak sekedar sebagai perundingan, melainkan semua upaya Hubungan Luar Negeri.¹³

Kebudayaan dalam pengertian umum berarti segala hasil dan upaya budi daya manusia terhadap lingkungan. Ada juga yang mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.¹⁴

Dengan demikian, diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui

¹² Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan; Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang*, Ombak, Yogyakarta, 2007, hlm. 2

¹³ *Ibid*, hlm. 3

dimensi kebudayaan seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga, kesenian dan pariwisata.¹⁵

Yang dapat melakukan kegiatan diplomasi kebudayaan adalah pemerintah, maupun lembaga non-pemerintah, individual maupun kolektif, atau setiap warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu.

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi antar Negara dan antar bangsa di dunia telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara serta pada gilirannya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai

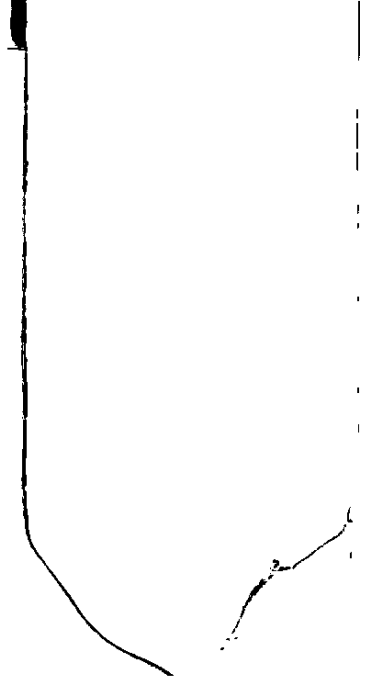
dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini. Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri tidak hanya merupakan monopoli negara (state actors). Sebagai contoh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) memberikan kemungkinan Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing. Makin beragamnya aktor hubungan luar negeri selain negara (non-state actors) seperti organisasi-organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok minoritas, individu dan Bahkan Pemerintah Daerah harus dianggap sebagai suatu potensi bagi perjuangan diplomasi Indonesia dilingkup hubungan internasional. Ragam aktor tersebut dapat digunakan Indonesia sebagai model diplomasi multi-jalur (multitrack diplomacy) untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Dengan kata lain, hubungan dan kerjasama luar negeri dapat juga dijalankan oleh para pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, para pejabat daerah, mahasiswa, wisatawan dan sebagainya. Tentunya hubungan dan kerjasama luar negeri dimaksud harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri. Diplomasi multi-track dalam melaksanakan politik luar negeri berakibat pada munculnya elemen "transendental" yang menipiskan sekat tebal yang menghubungkan faktor internasional dan faktor domestik dalam mengelola diplomasi. Artinya, diplomasi tidak lagi hanya

nasional Indonesia ke luar, tapi juga menuntut kemampuan dan kejelian para pejabat dan instansi terkait untuk "mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan dunia luar ke dalam negeri". Hal ini bisa kita sebut sebagai pola "intermestik". Sehingga manfaat dari hubungan luar negeri dapat benar-benar diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional kita. Selanjutnya sehubungan dengan Visi "Total Diplomacy" dari penggunaan seluruh upaya dan aktor hubungan luar negeri dalam pelaksanaan politik luar negeri, keterlibatan daerah sebagai salah satu "track" dan aktor dari pelaksanaan "diplomacy" sangatlah penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia. Terlebih dalam kerangka kerjasama internal yang erat antara semua komponen kebangsaan dan kenegaraan demi tujuan bersama menciptakan masyarakat yang taat hukum (law abiding society), keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan kewajiban bagi lembaga negara/lembaga pemerintahan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dalam hubungan luar negeri sebagaimana digariskan oleh peraturan perundang-undangan, diharapkan setiap lembaga negara dan lembaga pemerintahan baik di Pusat dan Daerah dapat bekerjasama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pertimbangan ini maka pada tahun 2003 Departemen Luar Negeri telah mengeluarkan Buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan Daerah, dewasa ini telah terjadi perkembangan baru yang penting pada proses penyempurnaan

sistem otonomi daerah yang berkelanjutan yang telah pula membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam hubungan luar negeri. Dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang No.22 Tahun 2000 telah menata ulang ruang lingkup dan kewenangan kerjasama luar negeri oleh daerah. Selain itu, lahirnya berbagai peraturan nasional dewasa ini yang memuat aturan lebih rinci dan teknis tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di berbagai bidang melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri telah memantapkan landasan hukum serta semakin memberikan kejelasan tentang rambu-rambu kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan luar negeri. Selain penataan ulang kewenangan, kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah membawa nuansa baru dalam kerjasama luar negeri daerah. Dengan demikian kerjasama luar negeri oleh daerah pada tingkat daerah harus dilakukan melalui koordinasi hirarkis yang pada tingkat tertentu adalah Gubernur. Di tingkat pusat sejalan dengan Undang-Undang No.37 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Departemen Luar Negeri mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan konsultasi hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh daerah.¹⁶

Kaitannya dengan studi kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah, dalam mengembangkan sebuah pariwisata di Kabupaten Boalemo,

¹⁶ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia; *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri*



1

PemKab Boalemo bersama Propinsi Gorontalo, atas nama sebuah daerah yang otonom, mewujudkan sebuah paradigma baru yang muncul akibat dari globalisasi dimana Propinsi Gorontalo menjadi salah satu aktor dari Hubungan Internasional, melakukan sebuah hubungan kerja sama dengan Negara lain dalam mewujudkan sebuah pariwisata yang bertaraf Internasional.

2. Teori Peranan

Teori Peranan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.¹⁷ Peranan adalah perilaku yang dilekatkan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan posisi itu.¹⁸ Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer, peranan merupakan fungsi, kedudukan atau bagian dari kedudukan itu sendiri.¹⁹

Teori peranan berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari sebagai Presiden, Menteri Luar Negeri, Anggota DPR, atau warga biasa, yang masing-masing posisi itu memiliki pola perilaku tersendiri. Seseorang yang

¹⁷ Jack C. Plano. Robert E. Riggs. Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1994. Hlm. 220-221

¹⁸ Mochtar, Mas'oed. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM. Yogyakarta. 1989. hlm. 44

¹⁹ Kamus Ilmiah Populer. *Kamus Ilmiah Populer*. Alfabeta. Yogyakarta. 2002. hlm. 554

menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan (*expectation*) itulah yang membentuk suatu peranan.²⁰

Dari pemaparan-pemaparan di atas, maka setiap kelompok memiliki perannya masing-masing di mana setiap kelompok memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Kaitannya dengan studi kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah, Pemerintah Kabupaten Boalemo memegang peranan yang sangat penting dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan untuk menjadikan potensi wisata pantai Bolihutuo sebagai tujuan wisata Internasional. Kebijakan tersebut diantaranya adalah dalam hal pengembangan sarana dan prasarana berupa pembangunan jalan serta sarana penunjang lain yang diperlukan guna mendukung kenyamanan wisatawan dalam menikmati wisatanya. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mempromosikan pariwisata Boalemo pada umumnya, dan wisata pantai Bolihutuo pada khususnya secara global ke luar negeri untuk bisa menarik wisatawan manca negara datang dan berwisata di Kabupaten Boalemo sehingga pemerintah merasa bertanggung jawab dalam hal pengembangan dan promosi global pariwisata Kabupaten Boalemo. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berperan dalam mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak penanam modal/*Investor* baik lokal maupun asing dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya yakni meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pengembangan wisata pantai Bolihutuo menjadi obyek wisata internasional yang didukung oleh para

²⁰ Mochtar, Mas'ood. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM. Yogyakarta. 1989. hlm. 44-45

penanam modal melalui pemenuhan fasilitas pendukung yang akan mereka bangun melalui modal yang mereka tanamkan.

3. Konsep Wisata Internasional

Untuk memperkuat dan mempertajam analisa, digunakan Konsep Wisata (*destination*) Internasional sebagai salah satu kerangka berpikir yang penulis ambil. Konsep tersebut mengandung lima unsur dasar yaitu:²¹

- a. *Attractions*
- b. *Facilities*
- c. *Infrastructure*
- d. *Transportation*
- e. *Hospitality*

Unsur-unsur yang saling tergantung ini semuanya diperlukan agar para wisatawan dapat menikmati suatu pengalaman yang memuaskan yaitu, liburan mereka.

- a. *Attraction* merupakan hal-hal yang menarik perhatian wisatawan yang bisa saja berupa keindahan alam, iklim atau cuacanya yang menarik, kebudayaan, sejarah khusus tempat tersebut, *ethnicity*/kesukuan, serta *accessibility*/kemampuan atau kemudahan berjalan ke tempat tertentu. Ada beberapa hal yang khusus mengenai keindahan alam atau *scenery*. Pertama, dari pihak wisatawan tidak perlu ada pengeluaran biaya. Kedua, keserbaragaman (*variety*) di suatu daerah bisa merupakan sesuatu yang

²¹ *Wahana Wisata Internasional*, Sigit, Elan, dkk., *Keberagaman Kerajinan*

menambah daya tarik dan dapat dipakai sebagai bagian pokok dari promosi.

- b. *Facilities* merupakan fasilitas-fasilitas pendukung yang sangat dibutuhkan wisatawan. Walaupun *attractions* menarik wisatawan dari rumah atau tempat tinggalnya, namun fasilitas dibutuhkan untuk melayani mereka selama perjalanan. Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah *attractions* berkembang.²²

Selama tinggal di tempat yang jauh dari rumah, wisatawan harus tidur, makan dan minum. Fasilitas penginapan bervariasi dari hotel yang berstandar Internasional hingga fasilitas *camping* atau rumah saudara atau teman. Biaya penginapan biasanya berkisar antara seperlima atau seperempat dari pengeluaran total wisatawan. Penyediaan fasilitas penginapan dengan jumlah dan kualitas yang cocok sangat penting untuk mensukseskan suatu daerah pariwisata.

Jenis fasilitas penginapan juga ditentukan oleh jenis angkutan yang dipakai oleh wisatawan. Misalnya, perkembangan lapangan pesawat terbang sering menciptakan kebutuhan hotel-hotel yang bermutu.

Proporsi terbesar dari pengeluaran wisatawan biasanya dipakai untuk makan dan minum dari pada pelayanan lainnya. Selain itu, akan ada

tersebut termasuk souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah festival dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan).

c. *Infrastructure* termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dari suatu wilayah atau daerah. Hal ini termasuk sistem pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal-terminal pengangkutan, sumber listrik dan energi, sistem pembuangan kotoran/pembuangan air, jalan-jalan/jalan raya, dan sistem keamanan. Memang ada kritik bahwa pariwisata terlalu bergantung pada infrastruktur yang sudah berkembang. Akan tetapi, ada beberapa daerah tempat tujuan tertentu, khususnya yang baru ditemukan /diperkenalkan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan tanpa sistem infrastruktur yang sempurna. Terbatasnya jalan raya mungkin merupakan keuntungan bagi beberapa jenis wisatawan tertentu. Kalau semakin lama suatu tempat tujuan menarik, semakin banyak wisatawan, tambahan jumlah wisatawan sendiri akan mendorong perkembangan infrastruktur. Dalam kasus lain, hal sebaliknya yang berlaku. Perkembangan infrastruktur perlu untuk mendorong perkembangan pariwisata.

d. *Transportation* yang seharusnya menawarkan beberapa hal penting mengenai terminal pengangkutan dan fasilitasnya yang dapat menjadi semacam pedoman yang diantaranya adalah informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan pengangkutan lokal di tempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari

mencegah pengambilan kopor oleh orang yang bukan pemiliknya, sistem informasi harus menyediakan data tentang pelayanan oengangkutan lain yang dapat dihubungi di terminal termasuk informasi tentang tarif dan jadwal, suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua bandar udara, informasi yang terbaru dan sedang berlaku tentang jadwal keberangkatan dan kedatangan harus tersedia di papan pengumuman, melalui pengumuman lisan dan lewat telepon, tenaga kerja yang tersedia untuk membantu para penumpang khususnya yang tua, yang cacat, dan yang tidak dapat berbahasa daerah atau bahasa dari negara yang wisatawan kunjungi, informasi lengkap harus tersdia meliputi lokasi, tarif, jadwal, dan rute dari pelayanan pengangkutan lokal, dan yang tidak kalah pentingnya adalah, peta kota harus tersedia bagi penumpang.

- e. *Hospitality* atau keramahtamahan/kesediaan untuk menerima tamu. Wisatawan sedang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal. Maka, kepastian atau jaminan mengenai keamanan sangat penting. Khususnya bagi penumpang yang pergi jauh ke negara asing, gambaran tentang tempat tujuan mungkin diputar-balikkan (*distorted*). Misalnya orang Eropa menonton banyak film Amerika tentang kriminalitas dan kekerasan di sana. Maka mereka menerima kesan bahwa Amerika Serikat kurang aman dan takut pada saat tiba di terminal bandar udara, bis atau kereta api. Lagipula, biaya jasa kesehatan sangat mahal di sana dan hal ini

ini adalah masalah yang dihadapi oleh wisatawan. Situasi yang kurang

aman mengenai makanan, air, atau perlindungan polisi memungkinkan orang menghindari berkunjung ke suatu lokasi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus dipertimbangkan dan disediakan supaya calon wisatawan merasa aman sebelum dan selama perjalanan dan liburan.

Kaitannya dengan studi kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah terlihat bahwa dalam mencapai tujuan untuk menjadikan wisata pantai Bolihutuo sebagai wisata pantai yang bertaraf Internasional, Kabupaten Boalemo membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang saling mendukung. Selayaknya sebuah daerah kunjungan wisata Internasional haruslah memiliki apa yang disebut dengan persyaratan seperti yang disebutkan dalam Lima Unsur Dasar Obyek Wisata Internasional di atas. Maka Kabupaten Boalemo pun harus memenuhinya demi untuk pencapaian tujuan yang telah dipaparkan penulis yakni untuk menjadi sebuah kawasan wisata pantai Internasional pada khususnya.

Boalemo, dalam hal ini belum memiliki apa yang disebut dengan keunggulan dan kekuatan atau nilai jual Internasional dalam hal fasilitas, infrastruktur, dan transportasi serta hospitality meski atraksi/hal-hal yang menarik wisatawan telah Boalemo memiliki dengan kawasan wisata alam maupun budaya yang sangat menarik untuk ditawarkan kepada wisatawan.

F. Hipotesa

Penulis mengambil sebuah jawaban sementara dari pokok permasalahan yang penulis angkat yaitu untuk menjadikan wisata pantai Bolihutuo sebagai wisata pantai Internasional, Pemerintah Daerah memberikan kebijakan yaitu:

1. Dalam rangka memenuhi sebuah kepentingan ekonomi melalui strategi pariwisata, atas nama Otonomi Daerah, melakukan hubungan kerjasama dengan Negara Perancis dan Andorra untuk mewujudkan sebuah pariwisata yang bertaraf Internasional.
2. Pengembangan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana serta membenahi pemasaran dan promosi.

G. Jangkauan Penelitian

Penulis merasa perlu untuk membatasi “waktu” penulisan dan ruang lingkup penelitian. Hal ini dimaksudkan agar bisa mempertajam penganalisaan. Oleh karena itu, jangkauan penelitian dibatasi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2007. Penelitian ini berisikan masalah prospek dan kebilakan Pemerintah Boalemo dalam hal pengembangan wisata pantai Bolihutuo menuju taraf internasional. Selain itu, hal-hal lain yang berkaitan tidak menutup kemungkinan

Dipilihnya tahun 1999 sebagai jangkauan awal dengan melihat pada tahun tersebut merupakan tahun lahirnya Kabupaten Boalemo di Provinsi Gorontalo maka telah lahir pula sebuah perjalanan pariwisata yang baru di Kabupaten yang baru tersebut karena sebelumnya, Pariwisata Boalemo masih diatur oleh Kabupaten Gorontalo sebelum Boalemo menjadi Kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Gorontalo.

Sedangkan dipilihnya tahun 2007 sebagai jangkauan akhir dengan menimbang adanya data – data yang terkumpulkan dan juga pada tahun tersebut kegiatan dan atau usaha-usaha pengembangan wisata pantai Bolihutuo Kabupaten Boalemo masih terus berlanjut.

H. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

1. *Studi pustaka (data sekunder)*

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, majalah, koran, internet, dan sebagainya.

2. *Studi Instansi (data primer)*

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari data dari Instansi secara langsung. Diantaranya, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, DAPEDA dan sebagainya serta wawancara informal

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab dijabarkan lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan antara bab I dengan bab-bab lainnya memiliki keterkaitan hingga membentuk penulisan ilmiah yang runtut dan sistematis.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Pariwisata

Bab ini akan membahas Pariwisata secara umum yang terdiri dari dua sub bab yakni Pariwisata Indonesia dan Pariwisata Internasional. Mulai dari sejarah dan perkembangan pariwisata di Indonesia, kebijakan pariwisata Indonesia, pengertian daerah wisata internasional, laju kepariwisataan internasional, hingga faktor penunjang pertumbuhan pariwisata Internasional.

BAB III: Tinjauan Pariwisata Di Propinsi Gorontalo

Bab ini akan membahas mengenai kondisi umum pariwisata di Propinsi Gorontalo pada umumnya, pariwisata di Kabupaten Boalemo pada khususnya, berbagai macam obyek wisata yang ada di Kabupaten Boalemo, obyek wisata pantai Bolihutuo yang akan

**BAB IV: Upaya Pemerintah Daerah Kab. Boalemo Untuk
Mengembangkan Pariwisata Pantai Bolihutuo Menjadi Obyek
Wisata Internasional**

Bab ini membahas mengenai kebijakan apa saja yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam mengembangkan Pariwisata Pantai Bolihutuo menjadi obyek wisata internasional. Bab ini juga berisi mengenai faktor pendukung dan penghambat di dalam pengembangannya serta manfaat dan dampak positif dari